

Konsep dan Urgensi Pancasila dalam Arus Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia

Silviana Medhia Sari¹, Amalia Sundari², Rijka Arifa Junaedi³, Zaenul Slam⁴

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat intansi: Jl. Raya Bojongsari No.55, Bojongsari Baru, Kec. Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat 16516

Email: silvisilviana620@gmail.com¹, amaliasundari28@gmail.com², rizkaarifaz022@gmail.com³,

zaenul_slam@gmail.com⁴

Abstract

Pancasila, as the foundation of the state and the nation's ideology, faces the challenges of globalization, digitalization, and social change, which demand a contextual reinterpretation of values. This research uses a descriptive qualitative approach with a literature review method, examining scientific journals and books relevant to the dynamics of Pancasila's implementation. The results indicate that Pancasila remains relevant as an ethical, normative, and philosophical foundation for maintaining unity, building participatory democracy, and strengthening social justice. Revitalizing Pancasila-based character education is a key strategy in addressing radicalism, intolerance, and social inequality. Pancasila is an open and dynamic ideology that must be continuously internalized through public policy, education, and active community participation to maintain its relevance in the modern era.

Keywords: Pancasila, State Ideology, Globalization, Character Education

Abstrak

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial yang menuntut reinterpretasi nilai secara kontekstual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur terhadap jurnal ilmiah dan buku yang relevan dengan dinamika implementasi Pancasila. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila tetap relevan sebagai landasan etis, normatif, dan filosofis dalam menjaga persatuan, membangun demokrasi partisipatif, serta memperkuat keadilan sosial. Revitalisasi pendidikan karakter berbasis Pancasila menjadi strategi utama dalam menghadapi radikalisme, intoleransi, dan kesenjangan sosial. Pancasila merupakan ideologi terbuka dan dinamis yang harus terus diinternalisasikan melalui kebijakan publik, pendidikan, serta partisipasi aktif masyarakat agar tetap kontekstual di era modern.

Kata Kunci: Pancasila, Ideologi Negara, Globalisasi, Pendidikan Karakter

PENDAHULUAN

Pancasila yang merupakan fondasi negara Indonesia, muncul dari perjalanan sejarah perjuangan rakyat melawan penjajahan. Pertama kali dirumuskan oleh Soekarno dalam rapat BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila terdiri dari lima sila yang merepresentasikan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kemudian, Pancasila

diresmikan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 setelah adanya Piagam Jakarta. Konsep ini menyatukan nilai-nilai mulia dari budaya bangsa sejak zaman kerajaan hingga Sumpah Pemuda 1928. Pancasila berperan sebagai pengikat bagi bangsa yang beragam di tengah tantangan kolonial yang ada, konflik, ideologi, serta dinamika setelah kemerdekaan mulai dari Orde Lama hingga Reformasi. Pentingnya Pancasila terletak pada fungsinya sebagai identitas

nasional dan panduan dalam bernegara, serta mendorong semangat gotong royong dan musyawarah untuk mempertahankan kesatuan NKRI di tengah fragmentasi sosial politik yang kini sedang berlangsung. (Raidah Sholihah, 2025)

Secara historis, pembentukan Pancasila menunjukkan adanya semangat mufakat dan kearifan dari para pendiri negara yang merangkul semua golongan dan bersifat universal. Pancasila muncul sebagai hasil dari penggabungan beragam nilai kepercayaan, tradisi, serta budaya daerah yang selanjutnya menjelma menjadi ideologi yang menyatukan seluruh bangsa (Putri, 2022). Akan tetapi, ditengah gempuran kuat globalisasi dan perkembangan pesat teknologi modern, prinsip-prinsip Pancasila saat ini berhadapan dengan rintangan yang baru. Munculnya sikap individualistis, gaya hidup hedonis, dan hilangnya semangat kerja sama menjadi bahaya bagi identitas nasionalisme. Karena itu, upaya untuk mempuat lagi pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Pancasila menjadi sangat penting supaya ideologi ini tidak sekedar menjadi lambang yang bersifat seremonial, namun juga menjadi panduan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. (Irhandayaningsih, 2021).

Artikel ini menyajikan perspektif yang lebih menyeluruh dibandingkan studi oleh (Handayani, 2021) yang menyoroti signifikansi Pancasila dalam merespons efek globalisasi lewat pendidikan karakter, serta yang menggarisbawahi Pancasila sebagai jati diri dan watak di zaman modern. Diskusi dalam artikel ini

tidak terbatas pada peninjauan kembali urgensi nilai-nilai Pancasila pada saat ini, tetapi juga memiliki asal usul historis, perubahan penerapan, dan evolusi makna Pancasila dalam setiap fase perjuangan bangsa. Sasaran penulisan artikel ini adalah untuk menyajikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ideologi yang dinamis, sambil menegaskan kepentingan revitalisasi nilai-nilai nya dalam menjawab problematika sosial, budaya, dan politik kontemporer. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya membuktikan bahwa Pancasila bukan hanya pusaka ideologis, melainkan kekuatan moral dan prinsip kebangsaan yang aktual dan terus bertransformasi seiring perkembangan sejarah Indonesia. (Adhayanto, 2015)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengimplementasikan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan memanfaatkan pendekatan studi literatur. Informasi dikumpulkan dari beragam sumber seperti buku, publikasi ilmiah, dan arsip sejarah yang membahas tentang Pancasila. Prpses analisis dilakukan melalui pemeriksaan mendalam terhadap konten literatur guna mengilustrasikan ide dan betapa pentingnya Pancasila dalam rentetan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Langkah-langkahnya meliputi:

1. Pengumpulan informasi dari berbagai buku referensi, artikel ilmiah, serta dokumen historis yang berkaitan dengan Pancasila.

2. Melakukan analisis konten dari sumber-sumber tersebut untuk mengerti ide pokok dan signifikansi pancasila dalam catatan sejarah perjuangan bangsa.
3. Merumuskan kesimpulan sebagai representasi peran sentral pancasila dalam perkembangan perjalanan bangsa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila dapat ditelusuri asal usulnya dari kombinasi kata yang sarat akan arti, yaitu istilah “Panca” yang bermakna “Lima” dan kata “Sila” yang berarti “Asas”. Fakta ini terungkap lewat keberadaan berbagai peninggalan sejarah seperti prasasti, bangunan candi, dan tugu yupa. Tidak hanya itu, nilai-nilai terkandung dalam pancasila juga tercermin dalam kerukunan serta keharmonisan antar berbagai golongan kepercayaan sebagai fondasi utama bagi Negara Republik Indonesia, pancasila secara resmi di sahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan sejak momen bersejarah itu seluruh prinsip yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, dan pemerintahan wajib berpedoman pada nilai-nilai pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, sebuah tim yang disebut sebagai panitia sembilan sukses merumuskan bagian pembukaan Undang-Undang Dasar, oleh bapak M. Yamin dinamakan sebagai piagam Jakarta. Setelah meraih kemerdekaan masyarakat Indonesia merasakan berbagai perkembangan positif. Tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia ditahun 1945, pancasila diterapkan melalui suatu masa percobaan demokrasi. Di tahun 1950,

terjadi perubahan sistem negara dari bentuk republik serikat Indonesia menjadi negara yang berbentuk kesatuan. Pada tanggal 5 Juli 1959, diterbitkan sebuah dekrit presiden yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah disetujui oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai landasan konstitusional negara, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Undang-Undang Dasar ini dikenal secara umum dengan sebutan “Undang-Undang Dasar 1945”. Pada tanggal 11 Maret 1965, presiden Soekarno melimpahkan wewenang kekuasaan kepada Jenderal Suharto untuk menjalankan pemerintahan Indonesia. Peristiwa ini menandai bermulanya babak baru yang dikenal sebagai era Orde Lama dan berlanjut ke era Orde Baru. (Nurjanah et al, 2024)

a. Sejarah Perumusan Pancasila

Penyusunan pancasila diawali pada rapat pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang di ketua oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat.

Rapat itu menghadirkan tiga tokoh utama sebagai pembicara yakni Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Soekarno mengemukakan ide dasar negara yang dinamakan “pancasila” pada tanggal 1 Juni 1945, usulan ini muncul dari masukan seorang pakar bahasa. Ide tersebut lalu dimatangkan melalui diskusi pada rapat BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pancasila meliputi lima prinsip dasar, yaitu Ketuhanan Yang

Maha Esa (Keyakinan dan Kepatuhan dengan cara yang Berkeadaban), Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Persamaan derajat, hak, dan tanggung jawab antar sesama manusia), Persatuan Indonesia (Menajaga keutuhan bangsa melalui semangat Bhineka Tunggal Ika), Kerakyatan yang di pimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan/ Perwakilan (Menghargai kedaulatan rakyat melalui musyawarah mufakat), dan Keadilan Sosial bagi Rakyat Indonesia (Menciptakan keadilan di berbagai bidang seperti hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya). (Normmansyah, 2021).

1. Proses Perumusan oleh BPUPKI dan PPKI

Penyusunan Pancasila oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dilaksanakan melalui tiga pertemuan penting pada tahun 1945. Pertemuan pertama BPUPKI, yang diselenggarakan mulai 29 Mei hingga 1 Juni 1945 membahas secara khusus mengenai fondasi negara, di mana tokoh-tokoh penting bangsa seperti bapak Mohamad Yamin, Prof. Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno masing-masing memberikan pandangan mengenai dasa-dasar negara dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan lima konsep yang kemudian disebut sebagai Pancasila. Untuk memperbaiki rumusan ini, dibentuklah panitia sembilan, yang menghasilkan Jakarta Charter pada 22 Juni 1945, yang berisi rancangan awal pembentukan Undang-undang Dasar 1945 dengan prinsip pertama “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi

pemeluk-pemeluknya”. Rumusan ini menjadi fondasi awal bagi ideologi nasional Indonesia dan mencerminkan keseimbangan antara bangsa dan kesepahaman diantara berbagai golongan. (Kaelan, 2016).

PPKI (Jepang: Dokuritsu Junbi Linkai) didirikan pada tanggal 7 agustus 1945 untuk melanjutkan tugas BPUPKI, yang bertujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secara keseluruhan serta mengesahkan hasil pekerjaan BPUPKI. PPKI dipimpin oleh Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai wakil ketuanya. Sidang pertama PPKI dilangsungkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Ini Adalah pertemuan yang paling penting karena mengesahkan dasar negara serta konstitusi. Penyesuaian Piagam Jakarta: Sebelum sidang dimulai, terdapat lobi politik yang signifikan. Delegasi dari Indonesia timur menunjukkan keberatan terhadap rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta (“Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluk nya”). Untuk menjaga persatuan nasional dan integritas bangsa, Mohammad Hatta mengusulkan perubahan. Pengesahan hasil: Mengubah dan menetapkan Pembukaan UUD, dengan mengganti frasa “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluk nya” menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara, memilih Soekarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat

(KNIP) sebagai Lembaga yang membantu Presiden sebelum terbentuknya MPR/DPR. Penting nya: Keputusan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 secara resmi mengakui Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, yang juga menandakan berdirinya pemerintahan yang sah.

2. Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dan Pembentukan Pancasila

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pidato monumental dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang kemudian menjadi tonggak lahirnya dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya, Soekarno mengemukakan lima prinsip fundamental yang meliputi nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip tersebut dirumuskan sebagai sintesis nilai-nilai historis, kultural, dan religius masyarakat Indonesia yang plural. Konsep tersebut kemudian diberi nama “Pancasila” atas saran seorang ahli bahasa dan diterima sebagai dasar filosofis negara (Kaelan, 2022; Latif, 2021).

Selain Soekarno, sejumlah tokoh lain seperti Mohammad Yamin dan Soepomo turut menyampaikan gagasan mengenai dasar negara dalam forum BPUPKI. Setelah sidang pertama berakhir, dibentuk panitia kecil yang kemudian dikenal sebagai Panitia Delapan untuk

menghimpun dan mengkaji berbagai usulan tertulis dari anggota BPUPKI sebagai bahan perumusan lebih lanjut. Proses ini menunjukkan bahwa lahirnya Pancasila merupakan hasil dialog, kompromi, dan konsensus nasional yang mencerminkan semangat kebersamaan dan persatuan bangsa (Setiawan, 2025; Wahyudi, 2022).

3. Pancasila sebagai Produk Otentik Para Pendiri Bangsa

Pancasila dikenal sebagai hasil pemikiran orisinal dari tokoh-tokoh pendiri negara Indonesia, yang disebut sebagai The Founding Fathers. Sistem kepercayaan ini bukanlah hasil meniru atas mengadaptasi pemikiran dari luar, tetapi muncul dari nilai-nilai keyakinan adat istiadat, dan kebiasaan yang sudah lama hidup di negeri ini. Maka dari itu pancasila, memiliki ciri khas tersendiri dengan jati diri bangsa Indonesia. Orisinalitas pancasila bisa dilihat dari penelitian yang mendalam mengenai prinsip-prinsip kehidupan yang berbeda-beda dari warga negara Indonesia. Pancasila berperan sebagai cara pandang bangsa dan dasar filosofis negara, mampu menggabungkan berbagai macam perbedaan menjadi satu kesatuan utuh. Hal ini membuat pancasila menjadi terbuka dan bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat tanpa menghilangkan ciri khas setiap kelompok. (Putri, 2022)

Disamping itu, pancasila kuat menghadapi tekanan dari luar atau perubahan kondisi politik dalam negeri. Walaupun menghadapi berbagai

macam rintangan dan usaha untuk menukarnya dengan sistem kepercayaan lain. Pancasila tetap menjadi fondasi yang kuat bagi negara yang dipercayai oleh masyarakat Indonesia. Kekuatan ini membuktikan bahwa pancasila sudah menyatu dengan jiwa dan kepribadian bangsa. Lebih dari itu, pancasila berperan sebagai pedoman moral dan tujuan bagi kemajuan bangsa. Dengan prinsip-prinsip umum seperti beriman kepada tuhan, menghargai sesama manusia, bersatu pemerintahan oleh rakyat, dan kesetaraan sosial, pancasila sanggup menampung keberagaman. (Zikri, 2025)

b. Konsep dan Makna Pancasila

Sebagai dasar negara dan filosofi bangsa dan negara Republik Indonesia, pancasila tersruktur dari lima fondasi utama, keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan yang beradab dan adil, kesatuan Indonesia, Demokrasi yang dituntun oleh hikmat perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila tidak sekedar berperan sebagai ideologi, tetapi juga menjadi acuan moral, standar etika dan arah dalam keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Nilai-nilai ini memainkan fungsi vital karena menjadi asal dari semua peraturan perundang-undangan, fondasi bangsa, dan perspektif masyarakat Indonesia. Pancasila juga dijadikan rujukan dalam terhadap persatuan Indonesia berbagai aspek kehidupan dimulai dari politik, regulasi hukum, kehidupan sosial, ekonomi, sampai kebudayaan, serta berguna sebagai petunjuk arah dalam tata kelola negara dan aktifitas harian warga negara

Indonesia. Sebagai daya yang menyatukan bangsa, pancasila memiliki fungsi untuk mewujudkan negara yang berkeadilan sosial melalui mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis berlandaskan prinsip demokrasi yang dibimbing oleh kearifan dalam diskusi, seraya mempertahankan dedikasi terhadap persatuan Indonesia, tindakan yang beradab, adil, dan manusiawi, semuanya dilandasi oleh keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. (Syamsudin, 2023)

1. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa (Weltanschauung)

Pancasila dipandang sebagai filosofi hidup bangsa Indonesia, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip spiritualitas, humanitas, kesatuan, musyawarah, dan kesetaraan diterima sebagai kebenaran, kebaikan, keindahan, dan keberhargaan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip ini selanjutnya difungsikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa serta menumbuhkan dedikasi yang mendalam untuk mewujudkan dalam kegiatan sehari-hari. Sebagai suatu ideologi, pancasila mencerminkan bahwa nilai-nilai tersebut sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari tatanan sosial dan berlaku sebagai tolok ukur bagi perilaku dan perbuatan setiap individu. Pancasila juga menjadi sumber motivasi dan semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan aspirasi nasional. Sila ini menawarkan visi dan tanggung jawab yang jelas bagi seluruh lapisan Masyarakat untuk berkolaborasi dalam

membangun negara yang adil, Makmur, dan berdaulat.

2. Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara (Philosophische Grondslag)

Sebagai dasar filosofis negara, filosofische grondslag memiliki beberapa karakteristik khas yang membedakannya dari konsep-konsep lain. Beberapa karakteristik utama filosofische grondslag antara lain: Bersifat fundamental dan mendasar, Mencerminkan jati diri dan kepribadian bangsa, Bersifat abstrak-umum-universal, Menjadi sumber nilai dan norma, Bersifat dinamis dan terbuka. Sifat fundamental dan mendasar dari filosofische grondslag tercermin dari kedudukannya sebagai landasan berdirinya negara. Ia menjadi fondasi yang kokoh bagi eksistensi negara dan menjwai seluruh aspek kehidupan berbangsa.

Pancasila sebagai suatu system pemikiran meliputi lima pokok ajaran yang berfungsi sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, meliputi keyakinan kepada Tuhan, pengakuan atas kemanusiaan, persatuan, penerapan demokrasi berdasarkan musyawarah, serta keadilan sosial. Pemikiran ini berasal dari nilai-nilai tradisional, kebiasaan, dan norma keagamaan Masyarakat Indonesia, yang menjadikannya sebagai ciri khas identitas nasional yang menarik. (Kaelan 2016)

Pancasila sebagai dasar pemikiran yang bersifat permanen dan tidak bisa digantikan, mengacu pada pidato Bung Karno sebagai landasan pembentukan negara yang Merdeka.

Pancasila berada diposisi tertinggi dalam struktur norma, berfungsi sebagai sumber utama bagi seluruh hukum nasional sesuai yang diatur dalam Pembukaan UUD 1945. (SUDJITO, 2017)

Pancasila berperan sebagai landasan filosofi yang meliputi lima prinsip utama : Kepercayaan kepada Tuhan, penghormatan terhadap kemanusiaan, persatuan antara Masyarakat, penegakan demokrasi, dan keadilan sosial, yang merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa serta ideologi yang inklusif. Pancasila memiliki karakter yang permanen, tidak dapat di modifikasi, dan berfungsi sebagai penyaring nilai-nilai dari luar serta panduan dalam proses Pembangunan nasional. (Latif, y 2019)

3. Nilai-nilai Pancasila yang Bersumber dari agama, budaya, dan adat istiadat Indonesia

Indonesia Adalah sebuah bangsa dengan keanekaragaman etnis, ras, kepercayaan, tradisi, dan Bahasa yang luar biasa, membentang luas dari ujung barat hingga ujung timur, dan dari Sabang sampai Merauke. Semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang tertulis pada symbol Garuda Pancasila, memiliki arti “Berbeda-beda tetapi tetap satu”, menggambarkan semangat persatuan ditengah keanekaragaman tersebut. Pancasila sebagai fondasi negara, digambarkan dengan Burung Garuda emas yang membawa lima dasar negara dibagian dadanya. Karakteristik siswa Pancasila menggambarkan seorang pelajar

Indonesia yang memiliki kepribadian yang kuat, kemampuan mendunia, dan Tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam karakteristik utama: Moralitas yang jujur dan terhormat, penghargaan terhadap keberagaman global, kolaborasi tim, otomoni, pemikiran analitis, dan inovasi. (s. ardiyanti, 2021)

Pancasila mengandung prinsip-prinsip yang berakar dari agama, tradisi, dan kebiasaan Indonesia, yang membentuk identitas bangsa yang kokoh. Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan nilai-nilai spiritual yang diakui oleh semua agama di Indonesia. Nilai-nilai kegamaan dalam Pancasila Adalah hasil keanekaragaman agama yang ada di negara ini, Dimana setiap agama mengajarkan pengakuan terhadap Tuhan yang maha kuasa dan toleransi antar kelompok agama. Nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila juga berasal dari ajaran agama dan tradisi Indonesia. Sila kedua, Kmeanusiaan yang Adil dan Beradab, mencakup nilai-nilai universal yang diajarkan oleh semua agama, seperti cinta, keadilan, dan penghormatan terhadap harga diri manusia. Nilai-nilai kemanusiaan ini selaras dengan ajaran agama, yang menekankan penting nya melindungi hak asasi manusia dan keadilan sosial. (majid 2023)

Nilai-nilai persatuan dalam Pancasila berasal dari tradisi dan kebiasaan Indonesia yang menekankan kebersamaan dan Kerjasama timbal

balik. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mencerminkan semangat oersatuan yang tumbuh dari keanekaragaman suku, Bahasa, dan tradisi di Indonesia. Nilai-nilai persatuan ini merupakan hasil dari proses penyatuan budaya yang telah berlangsung selama berabad-abad di negara ini. Nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila juga berasal dari tradisi dan kebiasaan Indonesia, terutama tradisi diskusi dan mufakat. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang tumbuh dari tradisi musyawarah dalam Masyarakat Indonesia. Nilai-nilai demokrasi ini merupakan hasil dari proses sosial dan budaya yang menekankan kebersamaan dan keadilan. Nilai-nilai keadilan sosial ini merupakan hasil dari integrasi nilai-nilai agama, tradisi, dan kebiasaan yang mengutamakan keadilan dan kemakmuran Bersama. (noor,2024)

c. Urgensi Pancasila

Globalisasi kini menjangkau setiap negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Keadaan ini jelas memunculkan persoalan khusus bagi rakyat Indonesia, tetapi dengan berpegang kuat pada nilai-nilai Pancasila sebagai panduan dalam segala sisi kehidupan, ini bisa menjadi kekuatan untuk melindungi jati diri dan keberlanjutan bangsa. Apabila rasa cinta Tanah Air sudah ditanamkan sejak kecil dalam benak dan jiwa generasi penerus, meraka akan lebih Tangguh dalam menahan berbagai pengaruh buruk dan perubahan perilaku

yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. (handayani&dewi, 2021)

1. Penting nya Pancasila sebagai Pedoman bagi Pejabat Publik agar Tidak Kehilangan Arah

Pancasila berperan sebagai pedoman bagi pejabat public, disertai dengan pasal dari Ombudsman RI yang menunjukan contohnya dalam pelayanan public. Dokumen ini menekankan kebajikanb, keaddilan, dan kesejahteraan sebagai nilai-nilai fundamental yang menghindarkan terjadinya penyimpangan etika. (bandu. A, 2024)

Pancasila memainkan peran yang sangat penting sebagai panduan bagi para pemimpin negara agar tidak menyimpang dari jalur yang benar, karena pancasilaa bertindak sebagai dasar moral dan etika dalam system pemerintahan negaara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, rasa kemanusiaan, dan persatuan bangsa, memberikan petunjuk bertanggung jawab, dan dengan kehormatan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Jika tidak ada panduan ini, para pemimpin negara beresiko terjerumus kedalam Tindakan korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan tindakatan-tindakan yang merugikan Masyarakat luas. Pancasila berfungsi sebagai Batasan yang menentukan Tindakan mana yang dapat diterima dan tidak, berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, nPancasila memastikan bahwa pemerintahan negara tidak hanya didasarkan pada peraturan hukum, tetapi juga pada standar moral dan etika yang tinggi, yang menjamin terwujudnya keadilan yang sejati bagi seluruh warga negara.

2. Perlu nya Partisipasi Aktif Warga Negara dalam Pembangunan yang Dijiwai Nilai Pancasila

Keterlibatan Masyarakat mempercepat proses Pembangunan lewat diskusi, gotong royong, dan pengawasan program, dengan demikian mengurangi kemungkinan terjadi nya konflik dan memaksimalkan potensi local yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila mengenai persatuan. Tanpa adanya partisipasi ini, Pembangunan cenderung berjalan lambat dan tidak berkelanjutan, karena Pancasila mengharuskan adanya kesadaran kolektif yang lebih penting daripada kepentingan individu. Pendidikan nilai-nilai Pancasila melalui forum warga juga menciptakan motivasi dari dalam diri untuk kontribusi yang berkelanjutan.

Keterlibatan bertujuan untukaktif Masyarakat dalam Pembangunan negara merupakan keharusan dan menjadi indicator kunci dari keberhasilan suatu bangsa, khususnya di Indonesia yang mengadopsi sisetem demokrasi. Partisipasi ini menjadi semakin penting Ketika dipandu oleh prinsip-prinsip Pancasila sebagai ideologi, dasar negara, dan cara pandang Masyarakat. Pembangunan yang berlandaskan Pancasila bertujuan untuk

menghasilkan individu Pancasila dan komunitas Pancasila yang Sejahtera dan berkeadilan.

3. Pancasila Sebagai Penolak Hal-Hal yang Tidak Sesuai dengan Nilai Luhur Bangsa

Pancasila memiliki fungsi yang sangat penting sebagai penyaringan atau penangkal terhadap elemen-elemen yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muloia bangsa Indonesia, khususnya dalam era globalisasi yang pesat dan masuknya berbagai pengaruh budaya asing. Sebagai fondasi negara yang mengandung nilai-nilai keimana kepada Tuhan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan juga Persatuan Indonesia, Pancasila menyediakan landasan spiritual dan etika yang kuat untuk menolak budaya asing yang membawa paham sekularisme, individualisme, dan konsumsi berlebihan yang bertentangan dengan semangat gotong royong dan religiusitas bangsa. Nilai-nilai ini berperan sebagai pedoman dalam menyeleksi budaya asing sehingga hanya aspek-aspek yang cocok dan mendukung jati diri bangsa yang bisa diterima dan diterapkan, sementara elemen-elemen yang merusak kepribadian bangsa yang harus ditolak demi melindungi keutuhan identitas nasional. (wirawan 2024)

Disamping itu, kendala utama dalam menjadikan Pancasila sebagai perisai terhadap pengaruh yang tidak sesuai Adalah usaha untuk menanamkan prinsip-prinsip ini dalam pemahaman Bersama Masyarakat,

terutama generasi penerus. Pancasila bukan hanya sekedar lambing formal, tetapi harus menjadi tolak ukur dalam Tindakan sehari-hari untuk menanggulangi efek buruk budaya asing yang bisa menghancurkan semangat gotong royong diskusi, dan keadilan sosial. Pembentukan karakter yang berdasarkan Pancasila sangat esensial dalam mengembangkan pola pikir kritis dan rasa cinta tanah air yang kuat, sehingga Masyarakat bisa berinteraksi secara sefektif dengan budaya asing, menyerap elemen-elemen positif, dan menampik yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Indonesia. (irhandayaningsih 2021)

d. Dinamika dan Tantangan Pancasila

Sejak pertama kali di perkenalkan hingga sekarang, pengajaran nilai-nilai Pancasila di Indonesia telah berkembang secara berarti. Sebagai dasar ideologis negara, Pancasila sangat berperan dalam membangun jati diri dan rasa kebangsaan masyarakat Indonesia. Kemajuan ini meliputi perubahan dalam kurikulum, pemahaman, hambatan budaya, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan sosial. (Darmadi, 2019)

Salah satu hal penting dalam perubahan ini adalah perkembangan kurikulum pendidikan. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, Pancasila dimasukkan ke dalam kurikulum sebagai pelajaran yang memberi warga negara nilai-nilai mulia, seperti kesetaraan sosial, musyawarah, persatuan,

dan rasa kemanusiaan. Akan tetapi, seiring waktu, modifikasi kurikulum sesuai kondisi menjadi penting untuk menjamin bahwa nilai-nilai Pancasila tetap sesuai dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. (Jailani, J., & Saputra, 2022)

1. Perjalanan Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi

Pada masa Orde Lama (1945-1966), penerapan Pancasila menemui kendala besar, khususnya karena adanya sejumlah pemberontakan seperti Gerakan Darul Islam serta Republik Maluku Selatan, yang berupaya menukar Pancasila dengan ideologi yang berbeda. Di sepanjang era ini, Pancasila terus mengalami tantangan berat untuk mewujudkan persatuan dan kestabilan politik ditengah jurang perbedaan ideologi yang sangat dalam. (Wahyudi, 2022) Pada masa Orde Baru (1966-1998) ditandai dengan di tetapkannya Pancasila sebagai asas Tunggal Negara melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor XXV/MPRS/1996. Rezim Orde Baru memprioritaskan kestabilan serta ketertiban dalam proses pembangunan bangsa dengan mendorong internalisasi nilai-nilai Pancasila, disamping mengekang kebebasan dalam berpolitik. Pada kurun waktu ini, Pancasila di fungsikan sebagai instrument politik

untuk mengkonsolidasikan kekuatan pemerintah. (Sari, 2024)

Di era reformasi (1998-hingga kini), Pancasila di tafsirkan kembali sebagai fondasi negara yang semakin demokratis dan menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia. Transformasi ini memunculkan kesempatan terhadap kebebasan berpendapat serta partisipasi politik yang makin luas, serta pendirian lembaga-lembaga demokratis baru yang menjamin penerapan nilai-nilai Pancasila dengancara terbuka serta melibatkan semua pihak. (Setiawan, 2025)

Sepanjang era reformasi, Pancasila turut berperan sebagai dasar untuk menjaga keberagaman bangsa lewat semangat Bhineka Tunggal Ika (Persatuan dalam berpendapat). Pancasila memegang peranan penting dalam merawat kesatuan bangsa dan menanggulangi problem konflik sosial yang muncul sebagai konsekuensi dari kebebasan yang bertambah besar. (Sari, 2024)

2. Tantangan Pancasila di Tengah Arus Globalisasi

Di era global yang makin terhubung ini, Pancasila menghadapi tantangan besar yaitu derasnya arus budaya asing yang masuk dengan cepat melalui berbagai media seperti media sosial, film, musik, dan teknologi canggih. Jika tidak

ada penyaringan yang baik, budaya-budaya asing ini berpotensi menggantikan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia yang tertara dalam Pancasila, khususnya nilai gotong royong dan kolaborasi. Kondisi ini dapat berakibat pada pudarnya jati diri dan watak bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila. Dampak ekonomi dari globalisasi juga menjadi masalah serius bagi Pancasila, terutama dalam aspek kegiatan sosial. Pasar bebas dan investasi asing berpotensi memperlebar jurang ketimpangan sosial ekonomi jika tidak di iringi dengan kebijakan yang berkeadilan dan merata. Keadaan ini bisa jadi ancaman bagi sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, apabila kemiskinan dan kesenjangan terus bertambah. (Nurohma, 2022)

Selain itu, globalisasi mengakselerasi perputaran informasi dan komunikasi, sehingga nilai-nilai negatif seperti individualistik yang berlebihan dan gaya hidup hedonis semakin menguat di masyarakat. Gejala ini bertolak belakang dengan asas-asas Pancasila mendedepankan permusyawaratan, mufakat, dan keadilan sosial. Kemerosotan moral dan etika telah menjadi persoalan tersendiri karena pengaruh budaya konsumerisme dan penyalahgunaan teknologi seeing kali merusak standar moral bangsa yang tinggi.

Tantangan lainnya adalah pertambahannya sikap intoleransi dan paham radikal, yang berpotensi mengancam persatuan dan keutuhan negara. Dalam lingkungan global yang terbuka, gagasan ekstrem dan intoleran dapat menyebar luas dengan mudah, membahayakan kerukunan sosial, yang menjadi salah satu cita-cita Pancasila. Oleh sebab itu, mempertahankan nilai-nilai toleransi dan keharmonisan antar umat beragama sangatlah krusial dalam menghadapi tantangan ini. (Prasojo, 2023)

3. Pancasila Sebagai Identitas dan Kepribadian Bangsa Indonesia di Era Modern.

Pancasila masih menjadi fondasi utama sebagai jati diri dan ciri khas bangsa Indonesia di zaman modern yang di tandai dengan menduniannya segala hal dan pesatnya perkembangan teknologi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berperan sebagai penyaring budaya yang adaptif, mampu menerima dampak dari dunia Internasional tanpa menjatuhkan jati diri bangsa. Pancasila mempersatukan keberagaman budaya, kepercayaan, dan suku di Indonesia agar tetap bersatu dalam semangat Bhineka Tunggal Ika (Bersatu dalam perbedaan). Disamping itu, Pancasila memberikan dasar moral dan etika yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mempererat persatuan sosial, dan mengarahkan kebijakan negara menuju tujuan yang berkeadilan dan bermartabat.

Masalah utama saat ini adalah menjaga kelestarian nilai-nilai Pancasila di tengah merebaknya budaya konsumtif dan sifat individualistik, yang berpotensi menggerogoti prinsip-prinsip gotong royong, permusyawaratan, dan keadilan sosial yang terdapat dalam Pancasila. (Adhayanto, 2015)

Selain itu, perkembangan zaman menuntut penguatan implementasi. Pancasila di masyarakat agar tetap menjadi arahan yang dinamis, bukan hanya sekedar simbol. Tantangan terbesar adalah bagaimana Pancasila dapat berperan sebagai identitas ideologi yang ampuh dalam menghadapi berbagai ancaman ideologi dari luar dan paham sekularisme yang masuk ke Indonesia, tanpa menghilangkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila adalah langkah penting untuk membentuk kesadaran bersama dan pribadi bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa harus di lestarikan dan di amalkan secara berkelanjutan. Dengan begitu, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai identitas resmi negara, tetapi juga sebagai watak bangsa yang tercermin dalam tindakan sehari-hari serta alat pemersatu yang kokoh dalam menghadapi era globalisasi saat ini. (Fadli, 2023)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa

Pancasila merupakan fondasi ideologis dan filosofis bangsa Indonesia yang lahir dari proses historis, dialogis, dan konsensus para pendiri negara. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara secara konstitusional sejak 18 Agustus 1945, tetapi juga berfungsi sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*) dan dasar filsafat negara (*philosophische grondslag*) yang menjiwai seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara historis, perumusan Pancasila melalui BPUPKI dan PPKI menunjukkan bahwa nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial merupakan sintesis dari agama, budaya, adat istiadat, serta realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Hal ini menegaskan bahwa Pancasila adalah produk otentik bangsa Indonesia yang bersifat inklusif, dinamis, dan mampu mengakomodasi keberagaman.

Dengan demikian, Pancasila tetap relevan sebagai identitas dan kepribadian bangsa Indonesia di era modern. Penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila, partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, serta komitmen moral para pemimpin negara menjadi kunci utama dalam menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi terbuka yang adaptif namun tetap berakar pada nilai luhur bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanto, O. (2015). Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai identitas nasional di era globalisasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 45–60.
- Ardiyanti, S. (2021). Profil pelajar Pancasila dalam perspektif pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 6(2), 210–223.
- Bandu, A. (2024). Etika pelayanan publik berbasis nilai Pancasila dalam perspektif Ombudsman RI. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 12(1), 88–102.
- Darmadi, H. (2019). Dinamika pendidikan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 1–15.
- Fadli, M. (2023). Pendidikan karakter berbasis Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 8(2), 89–102.
- Handayani, D. (2021). Penguatan karakter kebangsaan melalui internalisasi nilai Pancasila. *Jurnal Civic Education*, 4(2), 88–101.
- Handayani, D., & Dewi, S. (2021). Nasionalisme generasi muda dalam perspektif Pancasila di era digital. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 77–91.
- Irhandayaningsih, A. (2021). Tantangan nilai kebangsaan dalam era digital dan globalisasi. *Jurnal Komunikasi dan Sosial Humaniora*, 16(1), 60–75.
- Jailani, J., & Saputra, I. (2022). Pengembangan kurikulum PPKn berbasis nilai kebangsaan. *Jurnal Kurikulum Indonesia*, 5(2), 70–84.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2022). *Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Latif, Y. (2019). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Latif, Y. (2021). Reaktualisasi Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam dinamika kebangsaan. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 11(1), 1–14.
- Majid, A. (2023). Nilai religius dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 18(1), 77–91.
- Normmansyah. (2021). Sejarah perumusan Pancasila dalam perspektif ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi Indonesia*, 18(2), 134–150.
- Noor, T. (2024). Internalisasi nilai Pancasila dalam masyarakat multikultural Indonesia. *Jurnal Moral dan Kewarganegaraan*, 11(1), 33–47.
- Nurohma, S. (2022). Keadilan sosial dalam perspektif Pancasila di era ekonomi global. *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(3), 150–166.
- Nurjanah, S., Rahman, A., & Putra, D. (2024). Dinamika penerapan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru. *Jurnal Sejarah dan Budaya Indonesia*, 14(1), 55–73.
- Prasojo, E. (2023). Pancasila dan reformasi birokrasi dalam perspektif tata kelola pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(3), 210–225.
- Putri, L. (2022). Pancasila sebagai identitas nasional dan ideologi pemersatu bangsa. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 9(1), 55–68.

- Raidah Sholihah. (2025). Urgensi Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa di era kontemporer. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 1–15.
- Sari, M. (2024). Transformasi makna Pancasila pada era reformasi. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 30(1), 45–60.
- Setiawan, R. (2025). Ideologi terbuka dan dinamika perumusan dasar negara Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 12(1), 1–15.
- Sudjito. (2017). Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 7(2), 101–118.
- Syamsudin. (2023). Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan sumber nilai hukum nasional. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenegaraan*, 12(2), 95–110.
- Wahyudi, A. (2022). Rekonstruksi historis penerapan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(2), 120–134.
- Wirawan, D. (2024). Pancasila sebagai filter budaya global dalam masyarakat modern. *Jurnal Kebudayaan Nasional*, 13(2), 140–156.
- Zikri, A. (2025). Ketahanan ideologi Pancasila dalam menghadapi ancaman global. *Jurnal Ketahanan Ideologi*, 4(1), 22–39.